



Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis

Muslim HU

Kantor Wilayah Kemenerian Agama Kota Jambi

muslimhu66@gmail.com



*Penulis Korespondensi

Histori Artikel:

Submit: 2023-01-22

Diterima: 2023-01-23

Dipublikasikan: 2023-02-01

Kata Kunci:

Manajemen, Kurikulum Merdeka Belajar, Lembaga Pendidikan Islam

ABSTRAK

Kurikulum sekolah harus terdiversifikasi dengan program merdeka belajar agar dapat berjalan secara berkesinambungan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Serta perlunya transformasi manajemen pendidikan nasional yang masih memiliki problem dalam mengatasi setiap kebijakan pendidikan yang saling tumpang tindih. Penulisan ini menggunakan studi literatur, penulisan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Sumber data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder yaitu Artikel, Jurnal dan Buku. Dalam penulisan ini sumber tertulis berdasarkan dokumen yang ada berupa dokumen-dokumen atau data yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Manajemen kurikulum merdeka belajar pada lembaga pendidikan Islam adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi dan mengajar. Manajemen kurikulum merdeka belajar meliputi aktivitas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan evaluasi (evaluating) dalam menyelesaikan segala urusan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada melalui orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

LATAR BELAKANG

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ialah membuat kebijakan baru terkait kurikulum. Kurikulum yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah khususnya menteri pendidikan adalah kurikulum merdeka belajar. Konsep kurikulum merdeka belajar ini menekankan pada pemberian kebebasan di bidang pendidikan (Faiz dan Kurniawaty, 2020); (Prasetyo, Bashori, & Novi Nur Lailisna, 2020). Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa dalam memberikan pembelajaran (Mualifah, 2013). Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dapat diatasi. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini (Sari, 2019).

Merdeka belajar berwujud, dimana peserta didik mampu memiliki kebebasan berfikir, terutama di era 4.0 pelajar dituntut untuk memiliki kebebasan berfikir dan mampu bergerak, yang dibarengi penanaman nilai-nilai karakter yang didukung untuk mampu melakukan inovasi-inovasi terbaru agar mampu bersaing di era ini. Pemaksimalan potensi siswa dan guru yang didukung dengan saling berkolaborasi dan ditambah pemaksimalan pengembangan sumberdaya manusia dengan benar dan tepat, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang.





Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi dan mengajar. Sedangkan pemahaman kurikulum sendiri dapat dipahami dengan arti sempit dan arti luas (Sista, 2017).

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, maka perlu adanya transformasi kurikulum sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 3 dan pasal 37 ayat 1. Kurikulum sekolah harus terdiversifikasi dengan program merdeka belajar agar dapat berjalan secara berkesinambungan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Serta perlunya transformasi manajemen pendidikan nasional yang masih memiliki problem dalam mengatasi setiap kebijakan pendidikan yang saling tumpang tindih. Dengan adanya transformasi manajemen pendidikan ini melalui konsep merdeka belajar diharapkan mutu pembelajaran di sekolah dapat bermutu dan mampu menghasilkan generasi bangsa yang bersaing secara global (Sherly, et al., 2020: 183–190) (Rahmasyah, 2021). Maka bagaimana manajemen kurikulum merdeka belajar, maka pada kajian ini akan dibahas.

STUDI LITERATUR

Manajemen Kurikulum

Manajemen merupakan suatu ilmu/seni yang berisi aktivitas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dalam menyelesaikan segala urusan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada melalui orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Dedi Lazuardi, 2017). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009). (Ansari et al., 2022).

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan (Rusman, 2009). (Ansari et al., 2022).

Kurikulum merdeka yang telah diterapkan diberbagai institusi pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi saat ini menjadi acuan baru peningkatan mutu pendidikan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Pembangunan manusia yang berakhlak mulia, mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki keterampilan individual skills dalam pemecahan masalah merupakan tantangan kemajuan bidang pendidikan modern (Fahmi et al., 2022).

Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Programme for



International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. (Sari, 2019).

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (Kemendikbud, 2019: 1-5), yaitu: 1) Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya (Kemendikbud, 2019: 1); 2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya (Kemendikbud, 2019); 3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).¹

Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi (Kemendikbud, 2019); 4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini (Kemendikbud, 2019) (Sari, 2019)

Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada tiga macam lembaga pendidikan Islam, yaitu (1) Lembaga Pendidikan Islam Formal, (2). Lembaga Pendidikan Islam Non Formal, dan (3). Lembaga Pendidikan Islam Informal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan Lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan nonformal ini disediakan bagi warga yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Sedangkan lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat (Bafadhol, 2017).

METODE

Penulisan ini menggunakan studi literatur, penulisan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Sumber data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder yaitu Artikel, Jurnal dan Buku. Dalam penulisan ini sumber tertulis berdasarkan dokumen yang ada berupa dokumen-dokumen atau data yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka Belajar (Ansari et al., 2022).



Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan studi pustaka. studi pustaka ialah cara peneliti menetapkan tema atau topik penelitiannya yang mana peneliti melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan informasi yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan lain-lain. Studi pustaka merupakan data atau riset melalui media cetak yang berasal dari buku referensi, jurnal ilmiah serta bahan-bahan publikasi. Kutipan penjelasan studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan suatu masalah dan tujuan penelitian. (Haharap, 2014)

Proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses penting, yaitu: 1) Editing merupakan memeriksa data kembali yang telah diperoleh peneliti. 2). Organizing merupakan pengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan; dan 3) Finding merupakan analisis lanjutan dari proses editing dan organizing.(Haharap, 2014)

HASIL

Lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik, menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah (madrasah) yang melaksanakan proses pendidikan Islam (Bafadhol, 2017).

Kemampuan “mengelola” dalam arti merencanakan dan mengorganisir kurikulum merupakan tujuan manajemen dalam perencanaan kurikulum. Siapa yang bertugas merencanakan kurikulum dan bagaimana perencanaannya secara profesional merupakan dua pertimbangan yang harus dilakukan selama proses tersebut (Lazwardi, 2017). Poin pertama terkait dengan kesenjangan yang ada antara upaya implementasi kurikulum dan ide dan pendekatan strategis. Masalah keterlibatan pribadi dalam perencanaan kurikulum adalah akar penyebab kesenjangan ini. Keterlibatan pribadi ini secara signifikan dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk merencanakan kurikulum (Triwiyanto, 2022).

Perencanaan kurikulum Merdeka Belajar

Terdapat dua kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum:

- a. Kondisi sosiokultural Pelatihan manajemen profesional bertujuan untuk membantu orang mempelajari atau menguasai berbagai materi untuk menghasilkan narasumber. sistem pendidikan mirip dengan sistem pendidikan karena melibatkan berbagai interaksi sosial antara guru dan murid atau guru dan lingkungannya (Tiara & Yarni, 2019).
- b. Ketersediaan fasilitas Salah satu penyebab gap antara perencana kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesipan guru-guru di lapangan. Itulah sebabnya J.G Owen menyebutkan perlunya pendekatan “from the bottom up”, yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas (Hamalik, 2010). (Ansari et al., 2022)

Organisasi Kurikulum Merdeka

Organisasi kurikulum berperan penting dalam menentukan pembahasan materi yang akan diajarkan dan mekanisme mengajar. Organisasi kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai pola dan susunan komponen pembelajaran yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit



yang bertujuan agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Pengorganisasian kurikulum harus memiliki panduan yang jelas, baik teori maupun situasi nyata di lapangan. Beberapa unsur yang terdapat pada organisasi kurikulum antara lain: (1) konsep, (2) generalisasi, (3) keterampilan, (4) nilai-nilai. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum: a) ruang lingkup, b) urutan, c) kesinambungan, d) terpadu, e) keseimbangan, f) waktu (Maghfiroh & Sholeh, 2022).

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan kurikulum darurat belum berjalan secara sempurna hal ini disebabkan minimnya fasilitas serta kurangnya pemahaman IT baik dari pendidik maupun peserta didik (Rofiq & Arifin, 2021). Kurikulum darurat yang diterapkan di madrasah ibtidaiyah dan mendekati standar, namun kegiatan pembelajaran inti masih jauh dari standar yang berimplikasi pada efektifitas pembelajaran online (Supriatna, 2021). Melihat hal tersebut, pemerintah terus mengkaji dan menghasilkan kebijakan yang dapat membentuk kurikulum penyesuaian dimasa pandemi yang menyadarkan kita kepada keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Sehingga melihat learning loss yang belum cukup bisa diatasi dengan pemilihan 3 kurikulum yang ditawarkan, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait Kurikulum Kurikulum Merdeka sebagai perkembangan daripada kurikulum-13 (Ansari et al., 2022).

Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar

Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum, karena kurikulum adalah program penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrument penilaian, ialah validitas, reliabilitas, objektivitas, kepraktisan, dan pembedaan. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa penilaian harus objektif, dilakukan berdasarkan tanggung jawab kelompok guru, rencana yang rinci, dan terkait dengan pelaksanaan kurikulum, sesuai dengan tujuan dan materi kurikulum, menggunakan alat ukur yang handal dan mudah dilaksanakan serta memberikan hasil yang akurat (Rohman, 2018).

PEMBAHASAN

Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. Berangkat dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum, sangat diperlukan suatu pengorganisasian pada seluruh komponennya. Dalam proses pengorganisasian ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan manajemen adalah salah satu disiplin ilmu yang implikasinya menerapkan proses-proses tersebut. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya. (Nasbi, 2017)

KESIMPULAN

Manajemen kurikulum merdeka belajar pada lembaga pendidikan Islam adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha,



meningkatkan kualitas interaksi dan mengajar. Manajemen kurikulum merdeka belajar meliputi aktivitas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan evaluasi (*evaluating*) dalam menyelesaikan segala urusan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada melalui orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada program kurikulum merdeka belajar ini, manajemen pendidikan memiliki peranan penting yang mana tenaga pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan sebagai salah satu karakteristik merdeka belajar agar dapat memenuhi tantangan peradaban pada masa depan..

REFERENSI

- Ansari, A. H., Alpisah, & Yusuf, M. (2022). Konsep dan Rancangan Manajemen Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Manajemen Administrasi Sekolah-AKWF2305*, 1(1), 34–45.
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 06(11), 59–72.
- Dedi Lazuardi. (2017). Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), 99–112.
- Fahmi, A., Aryani, M., & Najwa, L. N. (2022). Strategi Peningkatan Mutu Melalui Kurikulum Merdeka di Perguruan Tinggi Swasta (Descriptive Study di Prodi Manajemen UNDIKMA). *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran*, 7(2), 168–175. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jtp>
- Haharap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 08(01).
- Maghfiroh, N., & Sholeh, M. (2022). MERDEKA DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPSI DAN ERA. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05), 1185–1196.
- Nasbi, I. (2017). MANAJEMEN KURIKULUM: Sebuah Kajian Teoritis. *JURNAL IDAARAH*, 1(36), 318–330.
- Rahmasyah, M. F. (2021). MERDEKA BELAJAR: UPAYA PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH / MADRASAH. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 47–52.
- Rofiq, A. A., & Arifin, Z. (2021). Implementasi Kurikulum Darurat Madrasah di MAN 1 Kota Kediri. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 137–148.
- Rohman, F. (2018). Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Islam. *Nizhamiyah*, VIII(2), 22–42.
- Sari, R. M. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 38–50.
- Sista, T. R. (2017). Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Educan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.21111/educan.v1i1.1288>